

Judul : Pembangunan ponpes Al-Khoziny gunakan APBN menuai polemik
Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pembangunan Ponpes Al-Khoziny Gunakan APBN Menuai Polemik

Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk. Menewaskan 67 orang dan puluhan korban luka-luka. Proses hukum masih berjalan. Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU akan menyalurkan bantuan kepada Pondok Pesantren, usai bangunan pondok itu roboh. Kementerian PU bakal bertanggung jawab atas perbaikan Pondok Pesantren Al-Khoziny. Ia pun mengklaim anggaran perbaikan Pondok Pesantren Al-Khoziny bakal bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja nasional (APBN) tahun anggaran 2025. "Nanti kalau ada bantuan dari swasta, kita pasti akan lakukan. cuman sementara waktu dari APBN," sebut Dody di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025). Bagaimana tanggapan Istana? Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan Pondok Pesantren

(Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. "Pasca kejadian kemarin muncul beberapa pemikiran. Salah satunya adalah mungkin, pembangunan pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan APBN?" kata Prasetyo Hadi pada awak media sesuai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025). Namun, wacana itu mendapatkan penolakan dari anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya. Bahkan, ia mendesak pemerintah mengkaji

ulang penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo. "Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," kata Atalia kepada wartawan, Jumat (10/10). Hal berbeda diutarakan Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menerangkan jika Pemerintah wajib memberikan

bantuan atau membangun Ponpes. Apalagi, disaat mengalami musibah. Kewajiban itu dituangkan di dalam UUD 1945. Sementara itu, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi meminta Pemerintah menjelaskan secara utuh maksud menggunakan APBN. "Perlu diluruskan," pintanya. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pandangan Badiul Hadi dan Syaiful Huda terkait penggunaan APBN untuk membangun Ponpes Al-Khoziny, berikut wawancaranya.

SYAIFUL HUDA, Wakil Ketua Komisi V DPR

APBN Untuk Kembangkan Pesantren Adalah Wajib



“Harusnya negara hadir dalam menetapkan standarisasi pendirian pesantren.

Saat ini sedang ramai terkait wacana pembangunan Ponpes Al-Khoziny menggunakan APBN. Apa pendapat Anda? Kami menilai alokasi APBN untuk pengembangan lembaga pendidikan termasuk pesantren tidak hanya boleh tetapi juga wajib karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi lembaga pendidikan tersebut telah ratusan tahun terbukti menghasilkan lulusan berkualitas dalam ilmu agama maupun umum. Saat ini Ponpes Al-Khoziny memang kami khawatirkan di mana semua pihak utamanya negara harus mengeluarkan tangan untuk menjamin keberlanjutan lembaga pendidikan tersebut. Bukankah Ponpes itu dibangun atas bantuan masyarakat atau publik? Lembaga pendidikan seperti

pesantren umumnya memang didirikan oleh masyarakat dan bersifat swadaya. Kendati demikian harusnya negara hadir dalam menetapkan standarisasi pendirian pesantren, mengawasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, hingga menyediakan fasilitas infrastruktur. Soal robohnya Ponpes. Bagaimana? Kami yakin jika tidak ada niat jahat dari pengasuh pesantren Al-Khoziny untuk berbuat lalai saat membangun fasilitas infrastruktur pesantren mereka. Jika memang ada kekurangan, justru kami pertanyakan peran negara dalam membantu mereka saat menyediakan fasilitas pesantren. Sebab lembaga ini telah berdiri hampir 125 tahun dan banyak diper

caya masyarakat dalam melahirkan kader-kader bangsa yang tidak hanya kuat secara ilmu agama tetapi juga pilar penumbuh rasa cinta tanah air. Apakah Anda setuju ada proses hukum? Saat ini proses hukum Tragedi Al-Khoziny telah berlangsung di Pengadilan. Kami berharap semua pihak menghormati proses tersebut. Jangan melakukan trial by the press atau melakukan penghakimi secara sepihak tragedi Al-Khoziny ini melalui media massa atau media sosial. Ini momentum tepat bagi pemerintah untuk melakukan penataan pembangunan pesantren di Indonesia. Harus ada audit kelayakan infrastruktur pesantren. Jangan sampai ada korban lagi. ■ **rcv**

BADIUL HADI, Manajer Riset Seknas Fitra

Wacana Penggunaan APBN Perlu Diluruskan



“Kalimat menggunakan APBN tanpa penjelasan yang lengkap bisa menimbulkan tafsir ambigu.

Apa pendapat Anda mengenai wacana pembangunan Ponpes dibangun menggunakan APBN? Saya melihat wacana pembangunan pesantren menggunakan APBN ini perlu diluruskan dari sisi narasi dan tata kelola kebijakan publik. Maksud Anda? Diksi menggunakan APBN bisa menimbulkan kesan seolah-olah negara secara langsung membangun lembaga keagamaan tertentu, padahal dalam sistem pengelolaan keuangan negara, yang tepat adalah Pemerintah memberikan bantuan melalui program resmi yang sudah ada, misalnya skema Ruminawa Pesantren atau bantuan sarpras pendidikan keagamaan. Jadi, menurut Anda perlu diper

gas makna menggunakan APBN, ya? Kalimat menggunakan APBN tanpa penjelasan yang lengkap bisa menimbulkan tafsir ambigu, apakah ini proyek Pemerintah, hibah, atau inisiatif pribadi yang didanai negara. Padahal, jika disampaikan dengan benar, bahwa pesantren memperoleh bantuan program ruminawa dari karena memenuhi kriteria kelembagaan dan kebutuhan santri, maka tidak akan menimbulkan kesan pro kontra. Soal bantuan ke pendidikan. Apakah Anda tidak mempermasalahkannya? Kita tentu mendukung langkah Pemerintah yang berpihak pada penguatan lembaga pendidikan termasuk pesantren, tetapi narasi publiknya harus tepat dan transparan, agar tidak menimbulkan kesan politis atau

istimewa. Pesantren adalah lembaga masyarakat yang punya marwah, dan bantuan negara semestinya hadir dalam bingkai keadilan dan profesionalitas kebijakan. Apa pesan Anda? Dengan penjelasan yang lebih jernih dan akuntabel, bantuan Pemerintah kepada pesantren bukan lagi diperesepsikan sebagai pembangunan pakai APBN, melainkan sebagai bentuk kehadiran negara yang adil, sistematis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Selama ini Pemerintah memang memberikan bantuan dalam berbagai skema, dengan tujuan memperkuat pelayanan dasar sektor pendidikan. Yang terpenting dilakukan dengan mengedepankan keadilan, profesional dan transparan serta akuntabel. ■ **rcv**